

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat tiga hal yang penulis simpulkan dalam bab ini sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi yang berjudul “Gerakan Separatisme Bougainville di Papua New Guinea tahun 1975-1992”.

Pertama, gerakan separatisme di Bougainville disebabkan oleh adanya pertambangan di Panguna salah satu wilayah di Bougainville. Pada tahun 1972, dibangun pertambangan tembaga milik Australia. Pembangunan tersebut membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat Bougainville diantaranya muncul pemukiman baru bagi orang-orang dari luar Bougainville. Konflik ekonomi muncul seiring dengan adanya ketidakpuasan masyarakat atas pembagian hak-hak ekonomi, yaitu kompensasi yang tidak sesuai kepada para pemilik tanah pribumi.

Masalah Bougainville yang semula hanya masalah di bidang ekonomi kemudian mengarah kepada konflik politik dengan upaya untuk memisahkan diri dari Pemerintahan PNG. Sejak awal kemerdekaan, PNG sudah dihadapkan pada masalah Bougainville. Secara kultur, suku maupun politik Bougainville dengan PNG jelas berbeda. Bougainville pada awalnya dikuasai oleh Jerman dan PNG yang dikuasai oleh Inggris. Atas kebijakan PBB dan sebagai akibat dari Perang Dunia II maka kekuasaan milik Jerman dimandatkan kepada Inggris yang

penguasaannya diserahkan kepada Australia. Perbedaan kolonialisme tersebut menjadi faktor pendukung munculnya gerakan separatis di Bougainville. Bahasa dan budaya Bougainville berbeda dengan masyarakat yang hidup di wilayah PNG lainnya sehingga menyulitkan komunikasi yang dibangun antar wilayah. Perbedaan-perbedaan yang mendasar tersebut mendorong tuntutan disintegrasi bangsa semakin kuat setelah di picu oleh kepentingan ekonomi setelah adanya pertambangan di Bougainville.

Konflik di Bougainville memuncak seiring dengan tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam hal kompensasi pemilik tanah yang digunakan oleh perusahaan pertambangan milik Australia. Ganti rugi yang dituntut oleh masyarakat Bougainville terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan pertambangan ditolak oleh pemerintah dan perusahaan Conzino Rio Tinto sebagai pemilik dari pertambangan di Panguna. Penolakan tersebut semakin memecah belah masyarakat Bougainville menjadi dua kelompok yang memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Kedua, dalam mengatasi masalah di Bougainville Pemerintah PNG melakukan upaya perundingan. Perundingan yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara kedua belah pihak hanya bertahan sementara sehingga kerusuhan di Bougainville mencapai puncaknya dengan adanya sabotase dari tentara gerakan separatis di Bougainville. Penyelesaian yang berlarut-larut menimbulkan dampak yang lebih besar dan mengarah pada hal yang jauh dari tujuan semula.

Kepentingan ekonomi dari masyarakat Bougainville mengenai perselisihan kompensasi tanah atas pertambangan tersebut akhirnya dapat terselesaikan melalui upaya kesepakatan yang disebut dengan *Bougainville Agreement*. Pada tahun 1988, kerusuhan di Bougainville memuncak disebabkan adanya konflik antara kedua kelompok, yakni antara kelompok para pemilik tanah dan kelompok generasi muda ahli waris yang tidak mendapat hak-hak kompensasi.

Upaya militer pemerintah PNG dengan didatangkan PNGDF tahun 1989 hanya bersifat sementara untuk meredam konflik yang terus berkepanjangan. Pada tanggal 17 Mei 1990, tentara revolusi dari Bougainville mengumumkan deklarasi kemerdekaan Bougainville. Pemerintah PNG kemudian memblokir wilayah Bougainville untuk mengatasi masalah tersebut. Perundingan yang dilakukan pada tahun 1992 diatasi dengan Deklarasi Honiara dan mengakhiri konflik antara gerakan separatis di Bougainville dan Pemerintah PNG.

Ketiga, sebagai akibat dari adanya konflik di Bougainville timbul dampak yang besar khususnya dampak ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat Bougainville. Pada awal tahun 1960-an, masyarakat Bougainville mengalami masa transisi, yaitu proses perubahan yang dibawa orang-orang Barat mempengaruhi pola pikir dan ketidaksiapan masyarakat Bougainville yang rata-rata bermata pencaharian bercocok tanam dan nelayan. Perubahan tersebut memberikan dampak besar terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terbagi-bagi berdasarkan suku-suku yang ada di Bougainville. Pembangunan yang besar-besaran menimbulkan kesenjangan dalam hal ekonomi. Pemberian kompensasi yang tidak setimpal menimbulkan perselisihan dan

ketidakpuasan dari pemilik tanah terhadap pemerintah. Hal ini menjadi sebab utama dari munculnya gerakan separatis di Bougainville.

Masalah sosial mengacu pada tindakan kekerasan di Bougainville terutama disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran dan perpecahan antar suku. Masalah tingginya tingkat urbanisasi di PNG membawa akibat bertambahnya pengangguran. Adanya pertambangan di Bougainville hanya memunculkan masalah sosial dan kesenjangan ekonomi dikarenakan lapangan kerja dikuasai oleh pendatang dari luar. Masyarakat Bougainville yang hidupnya hanya bercocok tanam tentu saja tidak dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Krisis di Bougainville memberi pengaruh yang besar terhadap pertahanan dan ekonomi Papua New Guinea. Krisis ini merupakan persoalan yang telah ada sejak lama sebelum kemerdekaan Papua New Guinea 1975. Namun, persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Perbedaan konsep mengenai kedudukan tanah merupakan masalah yang sangat menonjol. Masyarakat Bougainville tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Australia yang terdapat dalam *Bougainville Copper Agreement* tahun 1967 dan 1974, yang menyatakan bahwa kandungan mineral dalam tanah merupakan milik pemerintah. Sebagai bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Bougainville, orang Bougainville memandang tanah-tanah milik warga mempunyai nilai spiritual yang besar bagi mereka.

Konflik yang terjadi di Bougainville selain dikarenakan oleh perbedaan bahasa, kultur tetapi juga di picu oleh kepentingan ekonomi antara pemerintah

PNG dengan Bougainville, serta adanya intervensi dari luar telah mendorong munculnya ketidakstabilan ekonomi yang mengarah pada konflik politik. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat Bougainville atas penanganan pemerintah PNG dalam penyelesaian masalah Bougainville.

